

**Analisis Pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja di Sektor Informal: *Literature Review***

**Aerrosa Murenda Mayadilanuari<sup>1\*</sup>, Silvia Nurvita<sup>2</sup>, Viny Natalia Dewi<sup>3</sup>, Dhieo Kurniawan<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nasional Karangturi, Semarang, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Magister Farmasi Klinik, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[aerrosa.murenda@unkartur.ac.id](mailto:aerrosa.murenda@unkartur.ac.id)

**ABSTRACT**

*Indonesia is an industrial country with a larger number of informal sector workers than formal sector workers. Workers in the informal sector were vulnerable to work-related accidents and illnesses. This was exacerbated by the lack of access to social security for them. Therefore, the maximal implementation of Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) was needed for informal sector workers. Pos UKK served as a community-based health for informal sector workers, managed and organized by, for, and with the workers themselves, providing health services primarily through a promotive and preventive approach, accompanied by simple/limited curative and rehabilitative measures. The aim of this research was to understand the implementation of pos UKK in preventing work accidents and work-related illnesses among informal sector workers. This study used an article review method by analyzing previous research findings. Article collection followed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) method. Currently, there had not been many informal sector businesses that had pos UKK. Only a few informal sectors had implemented pos UKK, but the implementation of pos UKK in some areas of Indonesia had still not been optimal. There was a need for cooperation between the government, community health centers, and informal sector business owners in establishing and implementing effective and integrated pos UKK. This would help prevent work-related illnesses and accidents among informal sector workers, ultimately enhancing work productivity.*

**Keywords:** *Pos UKK; Community Health Center; Work Accidents; Informal Sector.*

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara industri dengan jumlah tenaga kerja di sektor informal lebih banyak daripada tenaga kerja di sektor formal. Pekerja di sektor informal rentan mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Hal ini diperparah dengan tidak adanya akses jaminan sosial bagi mereka. Sehingga diperlukan pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) secara maksimal bagi pekerja di sektor informal. Pos UKK adalah wadah sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif sederhana atau terbatas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pos UKK dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi pekerja di sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan artikel dengan menganalisis hasil penelitian terdahulu. Dalam pengumpulan artikel menggunakan metode *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA)*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hingga saat ini belum banyak pemilik usaha sektor informal yang memiliki pos UKK. Hanya beberapa sektor informal yang sudah memiliki pos UKK, namun dalam pelaksanaan pos UKK yang ada di beberapa wilayah di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, puskesmas, dan pemilik usaha sektor informal dalam pembentukan dan pelaksanaan pos UKK yang baik dan terintegrasi. Sehingga resiko penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja pada pekerja di sektor informal dapat dicegah serta produktivitas kerja meningkat.

**Kata kunci:** *Pos UKK; Puskesmas; Kecelakaan Kerja; Sektor Informal.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jenis industri yang beragam mulai dari industri kecil, industri besar, maupun industri menengah. Pekerja yang bekerja di industri terbagi menjadi pekerja sektor formal dan pekerja sektor informal.<sup>(1)</sup> Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 83,34 juta orang dengan 55,9 persen bekerja pada sektor informal.<sup>(2)</sup>

Berdasarkan data dari Kemnaker RI pada semester I tahun 2023 jumlah kecelakaan kerja di Indonesia menurut jenis keanggotaan BPJS ketenagakerjaan dilaporkan sebanyak 159.127 kasus dari Pekerja Penerima Upah, 7.845 kasus dari Pekerja Bukan Penerima Upah dan 1.363 kasus dari Pekerja Jasa Konstruksi. Sedangkan untuk Penyakit Akibat Kerja tercatat sebanyak 91 kasus.<sup>(3)</sup>

Pekerja di sektor informal memiliki risiko yang lebih besar mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bila dibandingkan dengan pekerja yang ada di sektor formal.<sup>(4)</sup> Hal ini disebabkan karena sering kali pekerja sektor informal tidak memiliki jaminan sosial atau perlindungan tenaga kerja yang sama dengan pekerja formal.<sup>(5)</sup> Perlu adanya pembinaan dan pelayanan kesehatan khusus melalui pengembangan dan pemanfaatan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) karena jumlah tenaga kerja yang cukup besar di Indonesia. Serta risiko keselamatan dan kesehatan kerja lebih tinggi terjadi di sektor informal.

Bentuk Pos UKK adalah sekelompok pekerja informal yang dilatih dengan tujuan utamanya mereka mampu melakukan tindakan preventif untuk melindungi pekerja lain agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta kecelakaan kerja.<sup>(6)</sup> Dasar hukum dibentuknya Pos UKK yaitu Undang – undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Kepmenkes Nomor 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas, dan Peraturan Menteri Kesehatan No.100 tahun 2015 tentang pos upaya kesehatan kerja terintegrasi.

Terkait penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pos upaya kesehatan kerja yang ada di Indonesia. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah pelaksanaan pos UKK di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang

berlaku serta dapat mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja khususnya pada pekerja di sektor informal.

## METODE

Peneliti menggunakan desain penelitian dengan pendekatan studi tinjauan literatur (*literature review*). Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal penelitian nasional yang terakreditasi baik. Metode *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis* (PRISMA) digunakan dalam pengumpulan artikel mulai dari tahap identifikasi, skrining, kelayakan, hingga mendapatkan hasil artikel yang sesuai kriteria.

Kriteria yang dipilih dalam mencari jurnal adalah jurnal dengan pembahasan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang ada di sektor informal di Indonesia. Dalam pencarian jurnal tersebut dilakukan secara online menggunakan google scholar. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Pos UKK” dan “Pos Upaya Kesehatan Kerja”.

Setelah hasil penelusuran *keyword* pada google scholar ditemukan, kemudian dilakukan skrining untuk mendapatkan artikel yang layak dan relevan dengan variabel penelitian. Data penelitian yang digunakan berdasarkan jurnal yang telah diterbitkan pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Hanya artikel yang berbentuk *research article* dan *open access* yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL

Setelah dilakukan tinjauan literatur, ditemukan 7 artikel penelitian terkait pelaksanaan pos upaya kesehatan kerja yang sesuai dengan kriteria. Sebanyak 7 artikel tersebut memiliki lokasi penelitian yang berbeda di Indonesia. Lokasi penelitian di Pulau Jawa sebanyak 4 artikel, di Pulau Sulawesi sebanyak 1 artikel, dan di Pulau Sumatera sebanyak 2 artikel.

Hasil penelitian dari 7 artikel yang diperoleh mengatakan bahwa pelaksanaan pos UKK belum berjalan dengan optimal atau belum memenuhi persyaratan yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.100 tahun 2015 tentang pos upaya kesehatan kerja terintegrasi. Hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi D.I Yogyakarta mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan pos UKK masih berfokus pada kegiatan kuratif bukan kegiatan preventif atau promotif.

**PEMBAHASAN**

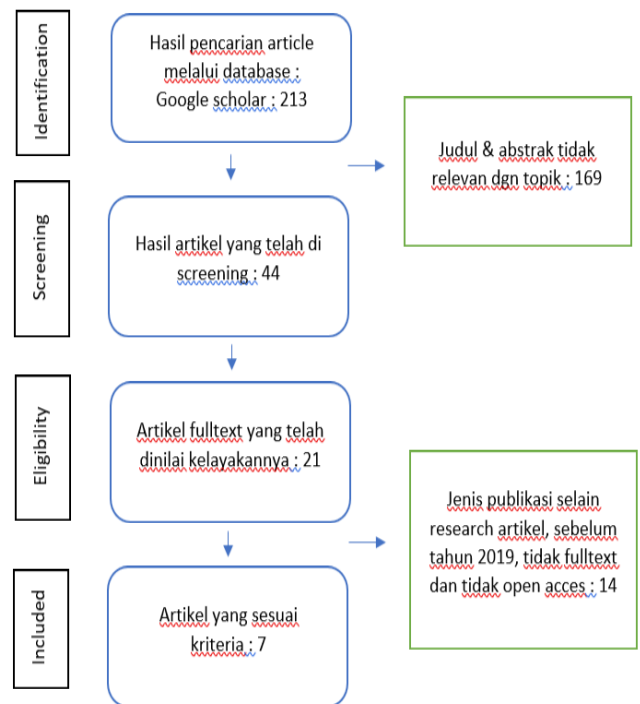
Salah satu peraturan yang mendasari terbentuknya Pos UKK bagi sektor informal di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 tahun 2015 tentang pos UKK terintegrasi.<sup>(7)</sup>Pos upaya kesehatan kerja merupakan suatu upaya pemberdayaan pekerja di sektor informal agar dapat melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan, pecegahan penyakit akibat kerja, dan pencegahan kecelakaan kerja.<sup>(8)</sup>Menurut Permenkes No.100 tahun 2015 tentang pos ukk terintegrasi, komponen penilaian keberhasilan pos UKK dilihat dari adanya kader dengan jumlah minimal 10% dari jumlah pekerja, ada aktivitas pelayanan terintegrasi dan aktivitas promotif dan preventif minimal 1 kali dalam sebulan, tersedia sarana pos UKK sesuai kebutuhan, ada catatan dan pelaporan serta memiliki uang iuran dari para pekerja di tempat kerja sektor informal tersebut.<sup>(7)</sup>Apabila semua komponen tersebut ada maka pelaksanaan pos UKK dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelatihan bagi kader pos UKK terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih belum optimal. Sehingga mengakibatkan pelaksanaan pos UKK menjadi tidak maksimal. Berdasarkan penelitian Asri (2019) menyatakan bahwa melalui pelatihan yang tepat bagi sumber daya manusia dapat meningkatkan kemampuan pelaksanaan suatu program yang berkualitas.<sup>(9)</sup>Penelitian Kurnia (2016) mengatakan bahwa kader pos UKK diharapkan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan perannya pada kegiatan kesehatan di lingkungan kerja sektor informal.<sup>(10)</sup>

Tujuan utama pos UKK menurut Permenkes No.100 tahun 2015 tentang pos UKK terintegrasi adalah memberikan layanan kesehatan preventif dan promotif sebagai fokus utamanya.<sup>(7)</sup>Namun,

hasil dari satu jurnal yang didapat dari Provinsi D.I Yogyakarta, mengatakan bahwa pos UKK lebih befokus pada tindakan kuratif.<sup>(11)</sup>

Apabila pekerja hanya fokus pada tindakan kuratif saja maka ketergantungan pekerja pada tenaga kesehatan masih tetap tinggi dan kader pos UKK menjadi lemah. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan layanan preventif dan promotif bagi pelaksanaan pos UKK. Garrido (2020) mengatakan bahwa perlu adanya pelatihan kepada pekerja supaya mereka dapat mengamati lingkungan kerja mereka yang berbahaya serta kemudian mereka dapat menerapkan tindakan pencegahan secara efektif.<sup>(12)</sup>



**Gambar 1. Pengumpulan artikel menggunakan metode PRISMA**

**Tabel 1. Tinjauan Artikel**

No	Pengarang, Tahun	Study design	Lokasi penelitian	Hasil
1.	Khairani, Rahmadina., 2019(13)	Deskriptif kuantitatif	Belawan, Medan	Peralatan tidak lengkap, papan informasi tidak ada dan jadwal pelayanan pos UKK belum maksimal dan tidak tepat.
2.	Putri, Anggie Agustin., 2020(14)	Deskriptif kualitatif	Kab. Boyolali	Pelaksanaan program pos UKK dari 14 indikator menghasilkan 28,6% (4 sudah indikator) sesuai, 42,8% (6 indikator) belum sesuai, dan 28,6% (4 indikator) tidak ada. Kesimpulan : pelaksanaan pos UKK di Puskesmas Cepogo belum maksimal.

3.	Wahyuni, Nurul Fitri Q., 2020(15)	Evaluatif eksplanatif	Kab. Semarang	Rata-rata persentase indikator penerapan pos UKK yang sudah sesuai sebanyak 22,5% (18 indikator), tidak sesuai sebanyak 36,25% (29 indikator), dan tidak ada sebanyak 41,25% (33 indikator). Kesimpulan: pelaksanaan pos UKK di Puskesmas Bergas belum maksimal.
4.	Fitriyani, Rohmatul U., 2020(16)	Deskriptif- komparatif dengan pendekatan kualitatif	Kab. Kudus	Pelaksanaan pos UKK di Puskesmas Rejosari lebih baik daripada di Puskesmas Dawe
5.	Agustin et al., 2023(11)	Kualitatif	D.I Yogyakarta	Upaya kesehatan kerja yang dilakukan oleh kader di pos UKK Kasongan saat ini masih berfokus pada upaya kuratif bukan preventif, namun pelaksanaannya masih belum optimal.
6.	Pradana, Bintang., 2023(17)	Survey deskriptif	Kab. Banggai	Penerapan pos UKK di Kab. Banggai belum maksimal.
7.	Miftahul, Khairin Nisak., 2021(18)	Deskriptif kualitatif	Kota Padang Panjang	Pelaksanaan progam UKK belum berjalan maksimal dab belum sesuai peraturan yang berlaku.

Kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memajukan pos UKK dapat mencakup berbagai bidang seperti kewirausahaan, keterampilan bekerja sama, pertolongan pertama, penggunaan alat pelindung diri yang benar, kesadaran akan bahaya pekerjaan, dan pelatihan kebakaran. Diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan ini dapat meningkatkan pelaksanaan pos UKK di sektor informal sehingga produktifitas kerja juga semakin meningkat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dengan adanya pelaksanaan pos UKK yang berhasil dapat meningkatkan produktivitas kerja sebanyak 56,8% dari masyarakat pekerja di sektor informal yang ada di Indonesia.<sup>(19)</sup>

### SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pos UKK di beberapa wilayah di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, puskesmas, dan pemilik usaha sektor informal dalam pembentukan dan pelaksanaan pos UKK yang baik dan terintegrasi. Sehingga resiko penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja di sektor informal dapat dicegah serta produktivitas kerja menjadi meningkat.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Chrismardani Y-, Satriawan B. Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal di Kabupaten Bangkalan. 2018. 2018;13(1):9.
2. BPS Indonesia 2023 [Internet]. 2023 [cited 18

Februari 2024]. Available from:

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>.

3. Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja s.d. Semester I Tahun 2023 [Internet]. 2023 [cited 18 Februari 2024]. Available from: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1388>.
4. Kalalo SY. Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Tentang K3 dengan Kejadian Kecelakaan Kerja pada Kelompok Nelayan di Desa Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pharmacon*. 2016;5(1).
5. Soewartoyo S, Triyono T. Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial terhadap Pekerja di Sektor Informal: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Prioris*. 2013;3(3).
6. Ratnasari AV, Cahyani MT. Analisis Risiko Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Petani Tambak di salah satu Pos UKK Kalitengah Kabupaten Lamongan. *Indonesian Journal of Health Community*. 2021(2):67-73% V 2.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi, (2015).
8. Widayati A. Perilaku kesehatan (health behavior): aplikasi teori perilaku untuk

- promosi kesehatan. Yogyakarta: Sanata Sharma University; 2020.
9. Asri S. Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan (Studi pada Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Aplikasi Manajemen*. 2015;13(4):662-72.
  10. Kurnia W. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertanian di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Widya Laksana*. 2016;5(1).
  11. Agustin H, Arianto ME, Rifai M. Implementation of Integrative Basic Occupational Health and Safety at Kasongan, a Tourism Village in Yogyakarta Province. *Jurnal kesehatan komunitas (Journal of community health)*. 2024;9(3):637-47.
  12. Garrido MA, Encina V, Solis-Soto MT, Parra M, Bauleo MF, Meneses C, et al. Courses on Basic Occupational Safety and Health: A Train-the-Trainer Educational Program for Rural Areas of Latin America. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020;17(6):1842.
  13. Khairani R. Kepuasan Nelayan Terhadap Mutu Pelayanan Pos Upaya Kesehatan Kerja Di Pos UKK Nelayan Belawan Tahun 2019: Universitas Sumatera Utara; 2019.
  14. Putri AA. Upaya Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi Wilayah Kerja Puskesmas. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*. 2020;4(Special 1):170-80.
  15. Wahyuni NFQ. Program Upaya Kesehatan Kerja pada Sektor Informal. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*. 2020;4(Special 1):101-11.
  16. Fitriyani RU. Penilaian Kinerja Pos Upaya Kesehatan Kerja di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2019. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*. 2020;4(1):112-21.
  17. Pradana B, Tongko M, Dwicahya B. Gambaran Penerapan Program Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) pada Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Banggai: Description of the Implementation of the Occupational Health Effort Post Program (UKK) for Informal Sector Workers in Banggai Regency. *Buletin Kesehatan Mahasiswa*. 2023;1(3):101-9.
  18. Miftahul KN. Evaluasi Upaya Kesehatan Kerja di Wilayah Kerja Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang Tahun 2021: Universitas Andalas; 2021.
  19. Priyandi R. Pemetaan potensi pembentukan pos upaya kesehatan kerja terintegrasi di wilayah puskesmas jurang mangu kota tangerang selatan tahun 2017: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2017; 2017.